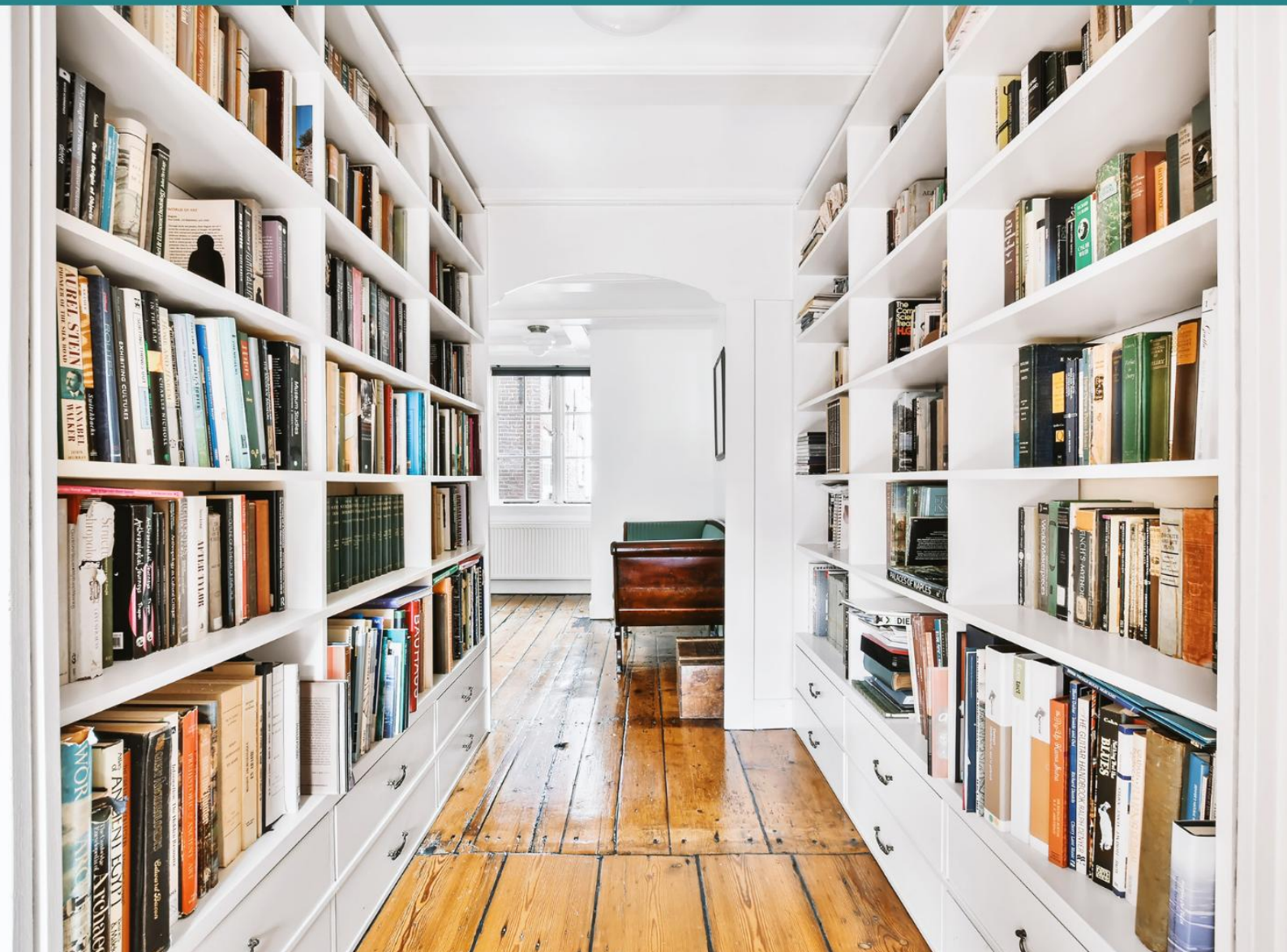


2024

ANALISIS PEMERATAAN PERPUSTAKAAN UMUM



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Analisis	8
1.4 Batasan Masalah	9
BAB II DATA DAN METODOLOGI	10
2.1. Sumber dan Jenis Data	11
2.2. Metodologi Analisis	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1. Pendahuluan.....	16
3.2. Hasil Analisis	16
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI	20

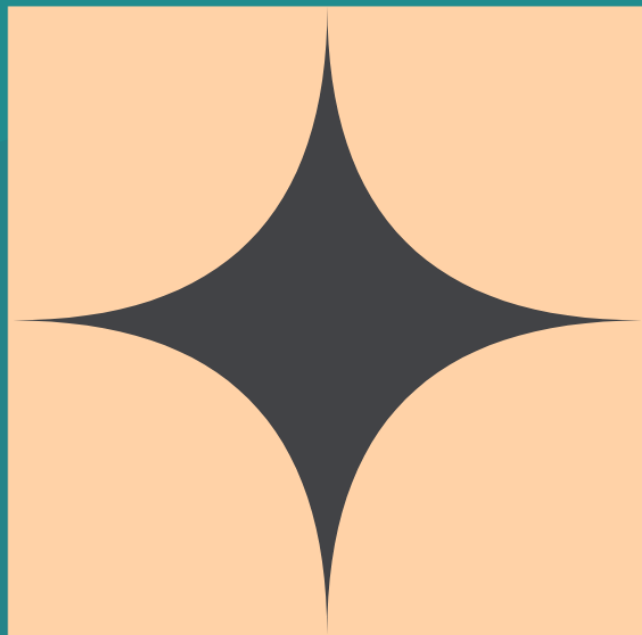


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Ketersediaan Perpustakaan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2024	11
Tabel 2. Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bandung 2019-2024	17
Tabel 3. Rasio Perpustakaan Umum per 10.000 Penduduk Tahun 2024	18

BAB I


PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, analisis, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Keberadaan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan informasi, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan data Portal Satu Data Kabupaten Bandung, perpustakaan terbagi ke dalam empat jenis, antara lain Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Perguruan tinggi.


Dengan demikian, perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat. Kemampuan literasi yang baik tidak hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan mengakses, memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembangunan daerah, literasi



menjadi modal dasar dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing, produktif, dan adaptif terhadap perubahan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) hadir sebagai salah satu instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan literasi masyarakat tercapai. Indeks ini disusun berdasarkan tujuh Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Perpustakaan, Perpustakaan yang Dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan, dan Anggota Perpustakaan. Selain unsur UPLM, perhitungan IPLM juga mempertimbangkan komponen Aspek Masyarakat (AM) yang disesuaikan dengan lokus atau segmentasi jenis perpustakaan. Komponen AM menggunakan sumber data resmi dari instansi pemerintah, yaitu Populasi Penduduk, Populasi Civitas Sekolah, Populasi Civitas Akademika, dan Populasi Penduduk Bekerja.

Pada tahun 2024, capaian IPLM di Provinsi Jawa Barat berada pada angka 72,76, sementara Kabupaten Bandung memperoleh skor



60,65. Dengan nilai tersebut, Kabupaten Bandung menempati peringkat ke-20 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dari tujuh unsur UPLM, terdapat beberapa komponen yang masih lemah apabila dibandingkan dengan nilai maksimal (1), yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan (0,58), Ketercukupan Koleksi (0,37), Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (0,31), dan Tingkat Kunjungan Masyarakat (0,01).

Dengan latar belakang tersebut, analisis ini difokuskan pada UPLM 1, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan dengan penekanan khusus pada Perpustakaan Umum. Fokus ini dipilih karena Perpustakaan Umum memberikan kontribusi terbesar sekitar 50% terhadap skor UPLM 1, mengingat cakupan pemustaka yang lebih luas dan beragam. Perlu dicatat bahwa nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2025 akan dihitung menggunakan metode yang berbeda dibandingkan dengan perhitungan IPLM pada tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kondisi pemerataan perpustakaan umum di Kabupaten Bandung, rumusan masalah yang akan dikaji dalam analisis ini adalah:

1. Bagaimana pemerataan layanan perpustakaan umum di Kabupaten Bandung berdasarkan rasio jumlah perpustakaan umum terhadap jumlah penduduk di setiap kecamatan?
2. Kecamatan mana yang memiliki rasio perpustakaan umum tertinggi dan terendah?

1.3 Tujuan Analisis

Tujuan dari analisis ini adalah untuk:

1. Menganalisis pemerataan layanan perpustakaan umum di Kabupaten Bandung dengan menggunakan rasio jumlah perpustakaan umum terhadap jumlah penduduk di setiap kecamatan.
2. Mengidentifikasi kecamatan dengan rasio perpustakaan umum tertinggi dan terendah, serta menginterpretasikan maknanya.

1.4 Batasan Masalah

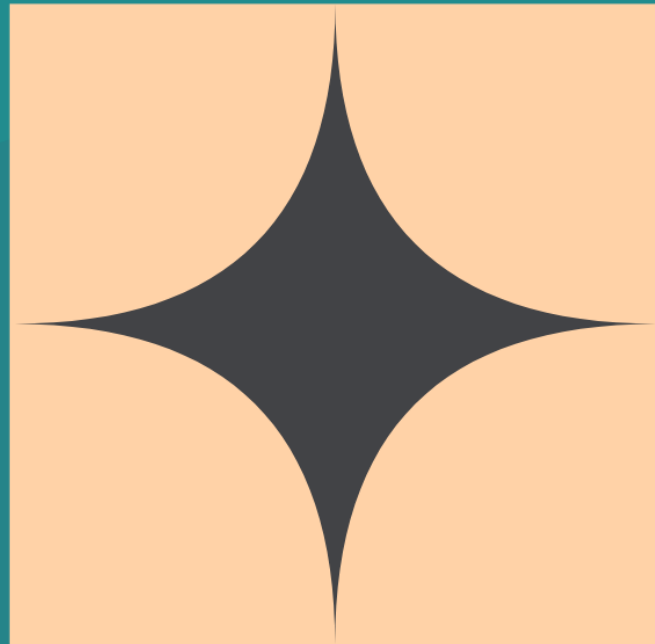
Analisis ini dibatasi pada analisis pemerataan layanan perpustakaan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 dengan menggunakan rasio jumlah perpustakaan umum terhadap jumlah penduduk di setiap kecamatan. Fokus utama analisis ini adalah pada perpustakaan umum yang merupakan jenis perpustakaan yang melayani masyarakat luas, dibandingkan dengan perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi.

Analisis ini tidak membahas faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat atau perubahan anggaran daerah yang juga dapat mempengaruhi distribusi perpustakaan. Selain itu, analisis ini hanya menggunakan data tahun 2024 sehingga perbandingan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2025 tidak dapat dilakukan karena perubahan dalam metode perhitungan IPLM yang berlaku pada tahun 2025.

BAB II

DATA DAN

METODOLOGI



2.1. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder tahun 2019–2024 yang bersumber dari dua kanal utama, yaitu Badan Pusat Statistik dan Portal Satu Data Kabupaten Bandung yang diunggah oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kabupaten Bandung. Data yang digunakan mencakup skor IPLM dan UPLM di Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, jumlah penduduk Kabupaten Bandung per kecamatan, jumlah perpustakaan berdasarkan jenisnya, dan jumlah perpustakaan umum per kecamatan di Kabupaten Bandung yang disajikan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Ketersediaan Perpustakaan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Perpustakaan Umum (Unit)
Arjasari	117.173	18
Baleendah	277.790	17
Banjaran	142.033	16
Bojongsoang	112.096	9
Cangkuang	86.927	14
Cicalengka	131.388	17
Cikancung	106.420	11
Cilengkrang	55.434	8
Cileunyi	182.960	9


Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Perpustakaan Umum (Unit)
Cimaung	95.383	13
Cimenyang	113.143	10
Ciparay	185.020	18
Ciwidey	93.069	9
Dayeuhkolot	106.402	9
Ibun	96.415	13
Katapang	138.694	9
Kertasari	76.136	11
Kutawaringin	112.890	9
Majalaya	170.250	14
Margaasih	154.454	9
Margahayu	121.023	10
Nagreg	62.712	9
Pacet	130.443	15
Pameungpeuk	95.615	8
Pangalengan	167.958	17
Paseh	146.839	15
Pasirjambu	98.727	13
Rancabali	54.330	6
Rancaekek	191.631	14
Solokan Jeruk	93.155	9
Soreang	123.211	13

2.2. Metodologi Analisis

Metodologi yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data statistik berupa angka untuk menggambarkan pemerataan layanan perpustakaan umum di Kabupaten Bandung menggunakan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), serta menyoroti kecamatan dengan cakupan layanan tertinggi maupun terendah. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif kuantitatif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data berupa angka dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi.

Secara umum, perhitungan indeks dilakukan dengan membagi komponen UPLM dengan aspek masyarakat yang relevan. Perhitungan pada UPLM 1, yaitu pemerataan layanan perpustakaan umum menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perpustakaan Umum}_i = \frac{\text{Jumlah Perpustakaan Umum}_i}{\text{Jumlah Penduduk}_i} \times 10.000$$

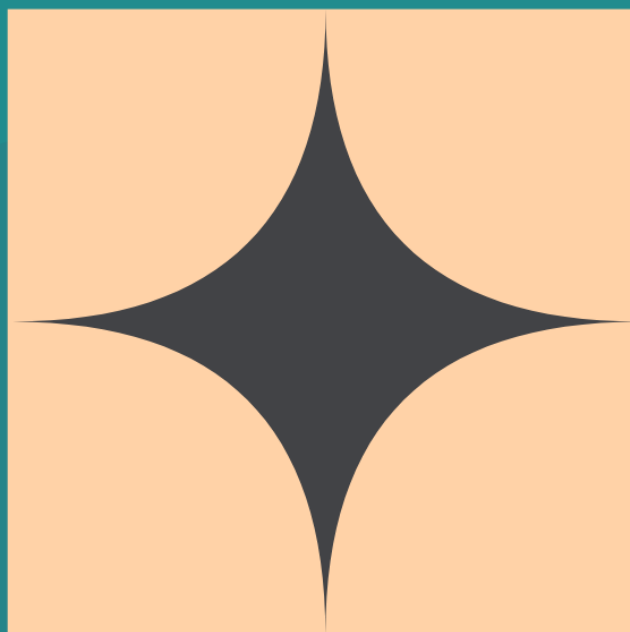


Perhitungan ini dilakukan pada tingkat kecamatan sehingga setiap kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki rasio tersendiri yang menunjukkan seberapa banyak perpustakaan umum tersedia bagi setiap 10.000 penduduk.

BAB III

HASIL DAN

PEMBAHASAN



3.1. Pendahuluan

Bagian ini menyajikan hasil analisis pemerataan perpustakaan umum di Kabupaten Bandung tahun 2024 berdasarkan metodologi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis dilakukan untuk menggambarkan kondisi sebaran perpustakaan umum antar kecamatan serta menilai tingkat kesenjangan akses layanan perpustakaan bagi masyarakat. Penyajian hasil dilakukan dalam bentuk tabel dan analisis deskriptif kuantitatif guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai jumlah dan rasio perpustakaan umum per 10.000 penduduk. Melalui penyajian ini, dapat diidentifikasi kecamatan dengan rasio perpustakaan tertinggi maupun terendah, sehingga memberikan gambaran tingkat pemerataan akses layanan perpustakaan umum di Kabupaten Bandung.

3.2. Hasil Analisis

Selama lima tahun terakhir, jumlah perpustakaan di Kabupaten Bandung yang mencakup empat jenis perpustakaan, yaitu Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Perguruan tinggi mengalami fluktuasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bandung 2019-2024

Tahun	Jumlah Perpustakaan (Unit)
2019	1.122
2020	1.168
2021	1.920
2022	1.285
2023	1.353
2024	1.919

Berdasarkan **Tabel 2**, jumlah perpustakaan di Kabupaten Bandung sempat meningkat dari 1.122 unit pada 2019 menjadi 1.920 unit pada 2021, namun mengalami penurunan tajam pada 2022 menjadi 1.285 unit. Akhirnya, kondisi ini kembali membaik dengan terjadinya peningkatan di 2024 menjadi 1.919 unit. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2024 jenis perpustakaan yang paling mendominasi adalah perpustakaan sekolah sebanyak 1.508 unit, disusul oleh perpustakaan umum sebanyak 372 unit, perpustakaan perguruan khusus sebanyak 26 unit, dan yang paling sedikit adalah perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 13 unit.

Meskipun jumlah perpustakaan sekolah mendominasi, perpustakaan umum memiliki posisi strategis di masyarakat karena menyediakan layanan yang dapat diakses oleh semua kalangan.

Dengan itu, langkah berikutnya adalah menilai pemerataan perpustakaan umum di tingkat kecamatan tahun 2024. Pemerataan ketersediaan perpustakaan umum dianalisis melalui rasio jumlah perpustakaan umum per 10.000 penduduk di setiap kecamatan dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Rasio Perpustakaan Umum per 10.000 Penduduk Tahun 2024

Kecamatan	Rasio	Kecamatan	Rasio
Arjasari	1,5	Kutawaringin	0,8
Baleendah	0,6	Majalaya	0,8
Banjaran	1,1	Margaasih	0,6
Bojongsoang	0,8	Margahayu	0,8
Cangkuang	1,6	Nagreg	1,4
Cicalengka	1,3	Pacet	1
Cikancung	1	Pameungpeuk	0,8
Cilengkrang	1,4	Pangalengan	1
Cileunyi	0,5	Paseh	1
Cimaung	1,4	Pasirjambu	1,3
Cimenyan	0,9	Rancabali	1,1
Ciparay	1	Rancaekek	0,7
Ciwidey	1	Solokanjeruk	1
Dayeuhkolot	0,8	Soreang	1

Kecamatan	Rasio	Kecamatan	Rasio
Ibun	1,3		
Katapang	0,6		
Kertasari	1,4		

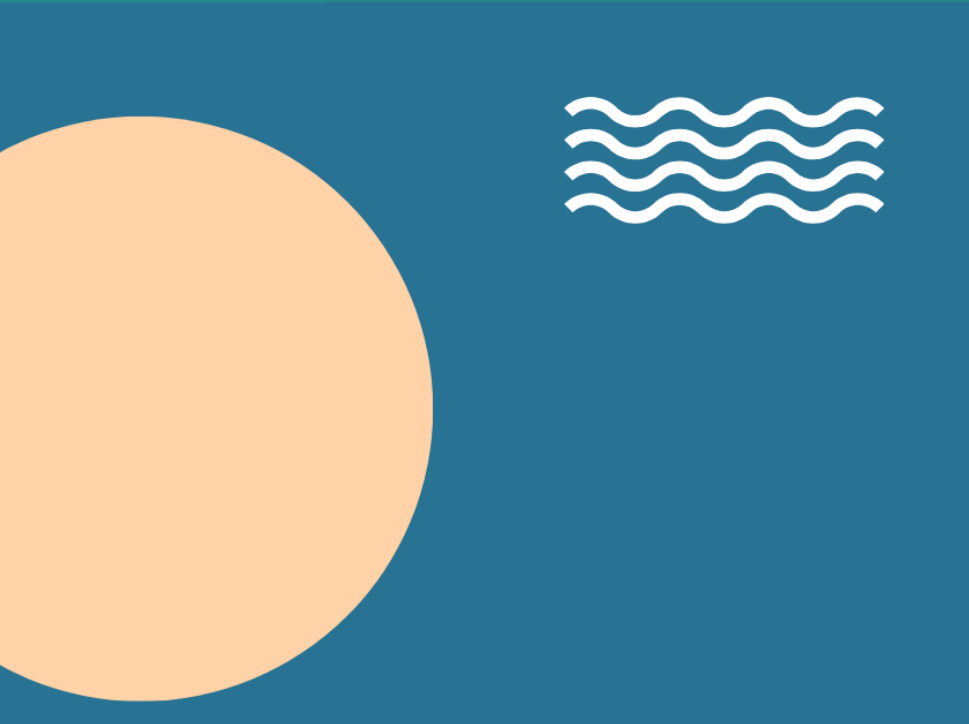
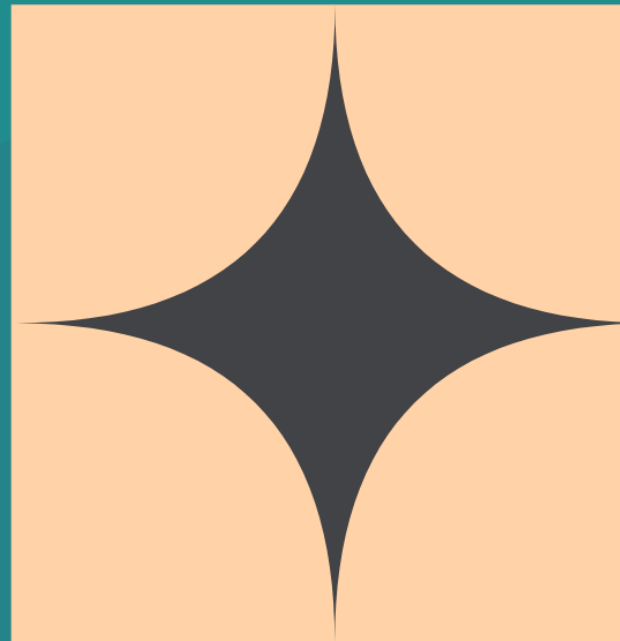
Dari total 372 perpustakaan umum di Kabupaten Bandung tahun 2024 terlihat bahwa distribusinya tidak merata antara kecamatan. Hasil perhitungan pada **Tabel 3** menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan rasio antar kecamatan. Kecamatan dengan rasio tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Cangkuang dengan 1,61 perpustakaan per 10.000 penduduk, sedangkan rasio terendah dimiliki oleh Kecamatan Cileunyi dengan 0,49 perpustakaan per 10.000 penduduk.


Interpretasi rasio ini memberikan gambaran beban layanan perpustakaan, di mana 1 perpustakaan umum di Kecamatan Cangkuang melayani sekitar 6.250 orang, sementara di Cileunyi 1 perpustakaan umum harus melayani hingga 20.000 orang. Perbedaan signifikan ini menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap layanan perpustakaan umum antar kecamatan di Kabupaten Bandung.

BAB IV

SIMPULAN DAN

REKOMENDASI





Akses perpustakaan umum di Kabupaten Bandung masih belum merata di seluruh kecamatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk yang masih rendah di beberapa wilayah. Pemerataan akses layanan perpustakaan menjadi kunci dalam memperkuat budaya baca dan membangun masyarakat yang berdaya literasi tinggi. Dengan demikian, perlu adanya upaya strategis untuk memperluas jangkauan perpustakaan umum ke seluruh kecamatan, baik melalui pembangunan fasilitas baru maupun pemanfaatan perpustakaan keliling. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dengan menjadi anggota, mengikuti kegiatan literasi, serta mengajak keluarga dan teman berkunjung ke perpustakaan dapat mempercepat terciptanya budaya baca yang inklusif dan berkelanjutan.